

Nomor : B/688/RB.06/2022

6 Desember 2022

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dengan hormat kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertahanan tahun 2022 adalah **71,03** dengan kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	14,25	14,56
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,86	6,35
	III. Reform	30,00	17,86	19,19
	Total Komponen Pengungkit	60,00	37,97	40,10

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,60	7,69
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,22	7,80
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,04	8,04
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,40	7,40
Total Komponen Hasil		40,00	32,26	30,93
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	70,23	71,03

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform*.

Hasil antara area perubahan pada Kementerian Pertahanan sebanyak 12 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	237,5	256,5	KASN
2.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	2,34	3,04	Kementerian Keuangan
3.	ASN Profesional	0-100	17,43	19,17	BKN
4.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,48	2,62	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	7,29	9,50	LKPP
6.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	92,69	94,97	Kementerian Keuangan
7.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,08	4,09	Kementerian PANRB
8.	Kapabilitas APIP	0-5	3	3	BPKP
9.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
10.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	77,14	76,22	ORI
11.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	76,50	76,98	ANRI
12.	Indeks Reformasi Hukum	0-100	-	49,95	Kementerian Hukum dan HAM

Secara akumulatif, nilai hasil antara Kementerian Pertahanan tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini,

terjadi karena terdapat peningkatan kualitas pada beberapa hasil antara yaitu Kualitas Pengelolaan Aset, ASN Profesional, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pelayanan Publik, dan Kualitas Pengelolaan Arsip. Namun, terdapat penilaian hasil antara yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah melakukan tindak lanjut rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, diantaranya:
 - a. Telah berupaya memperkuat peran Tim RB internal untuk meningkatkan implementasi RB sampai dengan tingkat unit kerja;
 - b. Telah melakukan pengukuran pemahaman pegawai terhadap Reformasi Birokrasi dengan hasil indeks persepsi pegawai tentang implementasi RB "78,83";
 - c. Telah melakukan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki potensi tumpang tindih dan telah menginventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - d. Telah menyusun dokumen arsitektur SPBE sebagai salah satu upaya dalam pengembangan penerapan *e-government*.

3. Selain tindak lanjut tersebut, Kemenhan juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya:
 - a. Telah meningkatkan peran Agen Perubahan sampai dengan tingkat unit kerja, namun evaluasi rencana aksi Agen Perubahan belum dilakukan secara maksimal dan belum adanya mekanisme pemberian *reward and acknowledgement* bagi agen perubahan yang proyek perubahannya berhasil;
 - b. Telah menerapkan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan dalam penyusunan produk hukum, namun dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut Kemenhan belum mengoptimalkan teknologi informasi dalam proses penyusunan hingga pemantauan peraturan perundang-undangan yang sedang dalam proses penyusunan;
 - c. Penguatan organisasi belum optimal ditandai dengan proses penyederhanaan birokrasi yang masih belum tuntas;
 - d. Kemenhan telah berupaya meningkatkan penerapan SPBE dengan menyusun arsitektur SPBE, namun implementasi atas penerapan *e-government* belum optimal;

- e. untuk peningkatan pengawasan Kemenhan telah menyusun kebijakan pengawasan internal antara lain penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* (wbs), namun kebijakan berkaitan dengan benturan kepentingan belum disusun;
 - f. Telah mengusulkan 4 unit kerja untuk memperoleh predikat ZI, namun belum ada unit kerja yang berhasil mendapat predikat menuju WBK maupun menuju WBBM pada tahun 2022;
 - g. Dalam pelayanan publik khususnya pada unit kerja pemberi layanan langsung kepada masyarakat belum ada kebijakan sistem kompensasi kepada penerima layanan, bila menerima layanan tidak sesuai standar.
4. Terkait komponen hasil, Kemenhan memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	BPK
2.	Nilai SAKIP	0-100	66,86	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	78	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	80,36	SPI Eksternal oleh KPK Tahun 2021
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	79,93	SPI Internal oleh KPK Tahun 2021

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Kemenhan, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Melakukan evaluasi rencana aksi Agen Perubahan sehingga proyek perubahan yang dibangun benar-benar bermanfaat. Selanjutnya, perlu didorong mekanisme pemberian penghargaan bagi Agen Perubahan yang telah berhasil membangun atau yang telah sesuai dengan target rencana kerjanya;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi pembina indeks hasil antara untuk memperkuat komponen hasil antara yang masih kurang baik, sehingga indeks hasil antara Kemenhan semakin baik dan dapat mendukung pencapaian penilaian reformasi birokrasi secara optimal;

3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sistem pengendalian penyusunan perundang-undangan yang ada. Disamping itu, agar mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan perundang-undangan;
4. Menyelesaikan proses penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan yang telah dimulai sebelumnya;
5. Menyusun kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat pengawasan internal di lingkup Kemenhan;
6. Meningkatkan kualitas pembangunan ZI dengan meningkatkan kapasitas TPI di Kemenhan dan menjaga kualitas unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat menuju WBK dan menuju WBBM;
7. Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan jika menerima layanan tidak sesuai standar khususnya terhadap unit layanan langsung kepada masyarakat;
8. Terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan dengan berinovasi yang disesuaikan kebutuhan organisasi atau unit kerja layanan dan melakukan pengukuran atas kepuasan kepada stakeholder terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil pengukuran tersebut agar dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik kedepan, baik di level pusat maupun di unit/satuan kerja.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenhan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,**



The image shows a circular official stamp of the Ministry of State Apparatus and Bureaucratic Reform (KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI) of the Republic of Indonesia (REPUBLIK INDONESIA). The stamp is light blue and contains the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that reads "Erwan Agus Purwanto".

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Pertahanan.